

Dukungan Filipina Terhadap Teknologi 5G Huawei di Tengah Tekanan Politik Amerika Serikat

Luh Putu Mastaridevi¹⁾, I Made Anom Wiranata²⁾, A. A Ayu Intan Parameswari³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: lpmastaridevi@gmail.com¹⁾, anom_wiranata@unud.ac.id²⁾, prameswari.intan@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to describe the reason behind the Government of Philippine supporting 5G technology from Huawei through qualitative method. Massive pressure from United States as alliance who bans Huawei and spread the message to all states over the world does not influence Philippine from using this technology nationally. Eventhough United States has spesifically warned Philippine to avoid using 5G from Huawei in a state visit, Philippine keep taking different decision and support this technology. Therefore, Reseacher uses three main concepts such as Neoclassical Realism, Cybersecurity, and Digital Economy to answer the reason behind Philippine support towards Huawei's 5G. This research appraises that Philippine's support as a response to international structure and domestic factor which put digital economy and cybersecutiy forward through the implementation of Huawei's 5G.

Keywords: Phillipine, 5G, Huawei, Neoclassical Realism

1. PENDAHULUAN

Filipina menjadi negara pertama di Asia tenggara yang menerapkan teknologi 5G. Keputusan ini diambil pada awal tahun 2019 dan mulai berjalan pada sekitar bulan Juni, 2019 (Xinhuanet, 2019). Perusahaan Filipina yakni *Globe Telecom* merilis layanan *boardband service 5G* pertama di Asia Tenggara dan menggandeng Huawei sebagai penyedia alat pendukung seperti radio dan modem (Reuters, 2019). Keputusan ini diambil dengan mengabaikan tindakan Amerika Serikat memberlakukan pelarangan dan mengimbau semua negara aliansinya untuk melakukan hal serupa. Filipina sendiri mendapat peringatan langsung oleh Amerika Serikat melalui kunjungan Mike Pompeo selaku *secretary of state* ke Filipina (Asia Times, 2019).

Amerika Serikat menyatakan alasannya dalam mengambil keputusan tersebut adalah atas dasar kekhawatiran bahwa Huawei akan

membantu pemerintah Tiongkok memata-matai AS atau bahkan melancarkan serangan. Alasan tersebut merupakan hasil dari kekhawatiran panjang Amerika Serikat atas Huawei dan hubungannya dengan pemerintah Tiongkok (Vox, 2019).

Peringatan Amerika Serikat bersifat politis karena dilakukan dalam situasi perang dagang dengan Tiongkok. Kompetisi teknologi 5G juga menjadi arena persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Klaim hak paten terhadap teknologi ini datang dari berbagai perusahaan teknologi dunia. Huawei memegang 11.423 standar proposal dan menjadi yang terbesar dan memimpin dalam kompetisi 5G (Wall Street Journal, 2019).

Selain itu sifat politis peringatan Amerika Serikat ini juga terkait hubungan eratnya dengan Filipina. Hubungan keamanan Filipina dan Amerika Serikat telah terjalin sejak lama dan tertuang dalam *Mutual 1951 Mutual*

Defense Treaty (MDT). Perjanjian ini merupakan yang pertama ditandatangani oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik sehingga jika dilihat dari segi keamanan, Filipina merupakan aliansi tertua di kawasan tersebut (The Diplomat, 2017). Dukungan Filipina terhadap Huawei membuat hubungannya dengan AS berada dalam risiko.

Peneliti menganggap hal ini menjadi poin menarik untuk dibahas karena besarnya potensi risiko akibat keputusan Filipina dalam mendukung Huawei terkait hubungan yang sudah terjalin lama dengan Amerika Serikat. Filipina tetap melanjutkan kerja sama dengan perusahaan Huawei dari Tiongkok untuk menerapkan teknologi 5G meskipun berada di bawah tekanan Amerika Serikat. Penelitian ini mempertanyakan alasan Filipina mendukung teknologi 5G Huawei dan mengabaikan larangan serta peringatan Amerika Serikat.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti memakai lima hasil riset atau literatur yang berada dalam satu tema sebagai kajian pustaka yang berhubungan dengan tindakan negara dalam menggunakan teknologi asing berdasarkan penilaian ancaman dan peluang yang ada di negara tersebut. Hasil riset pertama berjudul *The role of cybersecurity in world politics* yang ditulis oleh V.T. Tsakanyan (2017). V.T. Tsakanyan (2017) menekankan bahwa dalam hasil riset yang ia tulis, beberapa pendekatan untuk menjelaskan peran ruang siber (*cyberspace*) dalam dunia politik. V.T. Tsakanyan (2017) di penelitian ini menjelaskan pendekatan utama yang ia maksud terhadap peran *cybersecurity* dalam

dunia politik terbagi berdasarkan perspektif Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok. Amerika Serikat menurut V.T. Tsakanyan (2017) merupakan pemimpin di bidang informasi dan teknologi. Keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat saat ini sangat bergantung dengan kehadiran teknologi dan infrastruktur informasi. Sementara itu, V.T. Tsakanyan (2017) menggambarkan pendekatan oleh Rusia yang memiliki instrumen hukum dan kebijakan yang mendukung keberadaan *cybersecurity*. Pendekatan terakhir yang dipaparkan oleh V.T. Tsakanyan (2017) dalam tulisannya adalah berdasarkan pada perspektif Tiongkok. Tiongkok memandang bahwa perangkat lunak yang diproduksi Barat adalah sebuah ancaman. Selanjutnya penulis menggunakan tulisan kedua berjudul *Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia* oleh Muhamad Rizal dan Yanyan M. Yani (2017).. Rizal & Yani (2017) dalam tulisan ini menggunakan konsep *Cyber Security Role in National Security*..

Rizal & Yani (2017) juga memaparkan kebijakan *cybersecurity* Indonesia seharusnya dapat dievaluasi agar dapat menjadi unsur pendukung keamanan nasional melihat potensi dan ancaman keamanan yang ada. Menurut Rizal & Yani (2017) optimalisasi dari *cybersecurity* dapat dicapai dengan tiga rekomendasi. Pertama, *capacity building* yakni pelatihan sumber daya. Kedua, *International cooperation* atau kerja sama internasional. Ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum dengan instrumen-instrumen yang lebih terintegrasi.

Hasil riset ketiga yang penulis gunakan yakni *U.S and NATO Engagement with Russia in Cyber Domain* oleh Geoff Van Epps (2013). Epps (2013) dalam tulisan tersebut menggambarkan bahwa kompleksitas interdependensi pada permasalahan *cyber* di dunia memerlukan kerja sama terlepas dari bagaimana hubungan antar negara yang terlibat secara garis besar.. Terlepas dari terdapat hubungan yang rumit antara Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO, Epps (2013) melihat terdapat peran penting Rusia untuk bekerja sama dan mengatasi ancaman *cyberspace*.

Hasil riset keempat yang penulis gunakan berjudul *Technology Transfer: A Mode of Collaboration Between the European Union and China* karya Bernadette & Qian (1999). Tulisan ini memaparkan keadaan pasca Tiongkok meluncurkan *open door policy* pada tahun 1970 yang memprioritaskan pengadaan teknologi asing untuk memenuhi kebutuhan pengembangan negara. Bernadette & Qian (1999) memaparkan terdapat *mutual benefits* antar kedua negara di bidang ekonomi antara Tiongkok dan Uni Eropa. Hasil riset kelima berjudul *Technology Transfer to China During the 1980—How Effective? Some Evidence from Jiangsu* karya Samuel P.S Ho (1997). Tulisan ini juga memaparkan perihal *open policy* Tiongkok dalam mengimpor dan menyerap teknologi asing sebagai cara mempercepat perkembangan negara khususnya provinsi Jiangsu. Tidak seperti provinsi lain, Jiangsu dalam bukti-bukti yang dipaparkan dalam tulisan Ho (1997) tidak mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dan *transfer technology* ke Tiongkok pada tahun 1980an

tidak merata (Ho, 1997). Studi dari *international technology transfer* melihat bahwa keterlambatan yang dialami oleh *start-up* dan pencapaian di bawah ekspektasi biasanya berhubungan dengan masalah penyerapan, entah disebabkan oleh kurangnya persiapan, dan kurangnya kemampuan teknologi (Ho, 1997).

Hasil riset dari Tsakanyan (2017) dan karya Rizal & Yani (2017) telah menjelaskan signifikansi peran *cyber security* sebagai komponen keamanan nasional pada era kontemporer (Tsakanyan, 2017) serta cara negara memaksimalkan potensi dan mengurangi risiko dari *cyber security* (Rizal & Yani, 2017). Selanjutnya hasil riset karya Epps (2013) menjelaskan bentuk kerja sama dua negara yang memiliki pandangan berbeda secara ideologis dalam bidang *cyber security* (Epps, 2013). Terakhir, hasil riset dari Bernadette & Qian (1999) dan hasil riset Ho (1997) memaparkan tentang dampak ekonomi dari penggunaan teknologi asing melalui skema *transfer technology* dan impor teknologi.

Dua hasil riset pertama karya Tsakanyan (2017) dan Rizal & Yani (2017) belum menjelaskan cara negara dalam melihat ancaman *cybersecurity* untuk mendorong kerja sama antar negara. Hasil riset ketiga karya Epps (2013), masih meninggalkan ruang kosong tentang cara penilaian negara untuk menggunakan teknologi asing dari kaca mata keadaan internal negara masing-masing. Selain itu hasil riset dari Bernadette & Qian (1999) dan Ho (1997) masih meninggalkan ruang kosong penggunaan teknologi asing ditinjau dari risiko

keamanan nasional. Kelimanya belum ada yang menjelaskan peluang ekonomi digital dari tindakan menggunakan teknologi asing di negaranya. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengisi kesenjangan tersebut melalui penelitian ini yang akan menjelaskan tindakan suatu negara dalam mendukung penggunaan teknologi asing melalui teori realisme neo klasik dengan mempertimbangkan manfaat *cybersecurity* dan peluang ekonomi digital.

Kerangka Konseptual

Peneliti menggunakan teori Realisme Neo Klasik yang memiliki dua tingkat analisis yaitu struktur internasional dan faktor domestik yang diperdalam dengan konsep ekonomi digital dan *cybersecurity*. Posisi negara pada sistem internasional lah yang pertama mengarahkan cakupan dan ambisi kebijakan luar negeri yang diambil. Sebagai salah satu bagian dari pandangan realis, teori ini juga memiliki analisis pada tingkatan sistem internasional. Namun, yang membedakan dengan neorealisme adalah cara negara menerjemahkan tekanan dari struktur internasional sebagai ancaman bagi negara. Oleh karena itu, realisme neo klasik menganggap bahwa faktor ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri suatu negara (Rose, 1998, p.146).

Konsep ekonomi digital melihat bahwa teknologi telah mentransformasikan buruh, pendidikan, manajemen dan hiburan dengan menciptakan peluang pasar baru yang memberikan dampak ekonomis signifikan dan menjangkau berbagai sektor (Tsyganov & Apalkova, 2016, p.296). Ekonomi digital dalam studi hubungan internasional memiliki peran

penting di era tsykontemporer. Information and Communication Technology Multinational Corporations (ICT MNC) dipandang sebagai pelopor dalam transisi substansial pada mode dasar produksi dari industrial menuju fase *post-industrial*. Curtis (2009) dan Schwab (2016) dalam Mendes (2020) memahami bahwa transformasi dasar sumber daya di abad 21 kebanyakan berdasarkan pada informasi dan ilmu pengetahuan, pemrograman dan algoritma, computer dan transmisi data. Perusahaan dengan kriteria demikian dapat dijabarkan seperti *Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Tencent* dan *Huawei*. Kim & Hart dalam Rosenau & Singh (2002) juga menyatakan hal serupa bahwa pemenang di bidang teknologi saat ini akan menjadi yang mengelola kontrol standar pasar secara *de facto* dan secara bersamaan melindungi hak kekayaan intelektual.

Konsep *cybersecurity* menurut Tsakanyan (2017) berperan sebagai instrumen bagi negara untuk mencapai kepentingan nasional. Pemeliharaan *cybersecurity* berdasarkan Robinson et al. (2012) dalam Tsakanyan (2017) dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa aktor, salah satunya yakni *Infrastructure hardware providers* untuk mendukung *cybersecurity* suatu negara dari aspek cyberinfrastructure yang ia miliki

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini pada dasarnya menekankan pada pemahaman terhadap konstruksi yang terbentuk pada suatu peristiwa

(Merriam, 2009, p.13). Penelitian ini berjenis deskriptif yang menekankan hubungan sebab-akibat atau konteks terjadinya sesuatu (Neuman, 2014, p.38). Adapun teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode analisis dokumen. Metode ini adalah sebuah prosedur sistemik untuk mengulas dan mengevaluasi dokumen baik dalam bentuk cetak maupun elektronik (Bowen, 2009, p. 27). Dokumen yang digunakan dalam proses evaluasi dapat ditemukan dalam beberapa variasi termasuk iklan, agenda, *background paper*, buku dan brosur, peta dan grafik, koran, *press release*, proposal program, skrip radio dan televisi, laporan organisasi atau institusi, data survei, dan berbagai macam dokumen publik. Unit analisis dapat berupa negara, aliansi internasional, sekolah, komunitas, kelompok kepentingan, perang, strategi mengajar, hasil kebijakan dan pilihan suara (Lewis-Beck et. al, 2004, p. 1157). Berdasarkan penjabaran di atas, negara adalah unit analisis yang akan menjadi subjek penelitian yakni tindakan Filipina.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Politik dan Ekonomi Filipina

Filipina adalah sebuah negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden (Philippines Government, 2020). Distribusi kekuasaan dibagi menjadi tiga yakni eksekutif, legislatif, dan yudisial. Filipina juga merupakan sebuah negara demokratis dan republikan. Kedaulatan terletak pada warga negaranya dan semua otoritas pemerintahan yang berasal dari mereka. Cabang legislatif bertujuan untuk merancang undang-undang, mengubah dan mencabutnya melalui kekuatan

yang ditetapkan dalam Kongres Filipina presiden (Philippines Government, 2020). Filipina merupakan salah satu negara paling dinamis di kawasan timur Asia Pasifik terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh urbanisasi, pertumbuhan kelas menengah, dan presentase populasi usia muda dalam jumlah besar (World Bank, 2020). Ekonomi Filipina berakar pada kekuatan permintaan konsumen didukung oleh tenaga buruh yang baik dan pembayaran yang sehat. Angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Filipina juga cukup menjanjikan yakni berada di 6.4% pada tahun 2010-2019 dari yang sebelumnya di angka 4.5 pada tahun 2000-2009 (World Bank, 2020). Filipina juga mulai beranjak dari negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas yang ditunjukkan oleh data pendapatan per kapita 3.850 dollar AS menuju 4.046-12.535 dalam waktu dekat. Meski untuk tahun 2020 Filipina sama seperti banyak negara lainnya juga terkena dampak ekonomi dari pandemi. Filipina dalam beberapa tahun terakhir juga membuat progres baik dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan menurun dari 23.3% pada 2015 menjadi 16.6 % pada tahun 2018, sementara koefisien Gini menurun dari 44.9 menjadi 42.7 pada periode yang sama.

Penerapan *Independent Foreign Policy* Filipina pada Era Presiden Duterte

Kebijakan luar negeri independen Filipina di bawah diterapkan secara tegas pada kepemimpinan Presiden Duterte. Penegasan *Independent Foreign Policy* Filipina pada Era

Duterte Filipina dideskripsikan sebagai negara yang menjunjung kemandirian dalam kebijakan luar negeri. Kemandirian yang dimaksud adalah tidak terikatnya Filipina dengan mitra lama khususnya Amerika Serikat dalam pengambilan keputusan strategis. Pada periode ini perbedaan kebijakan luar negeri dapat dilihat dari mulai meningkatnya kerja sama dengan mitra non tradisional seperti Tiongkok dan Rusia (Philippine News Agency, 2016).

Sikap Aliansi Amerika Serikat terhadap Larangan Teknologi 5G Huawei

Amerika Serikat di tengah perang dagang dengan Tiongkok, mengeluarkan kebijakan untuk melarang teknologi 5G Huawei. Pelarangan terhadap teknologi 5G Huawei ini dilakukan per bulan Mei 2019 saat Presiden Trump menandatangani *executive order* yang menyatakan larangan bagi perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat untuk menggunakan alat telekomunikasi yang mengancam keamanan nasional (Forbes, 2019). Keputusan Trump didasarkan pada *International Emergency Economic Powers Act* bahwa presiden memiliki otoritas untuk meregulasi keputusan bisnis dalam merespon suatu ancaman nasional yang jelas serta deklarasi "*national emergency*" mengarahkan *US Department of Commerce* untuk memimpin usaha pelaksanaan. Pelarangan teknologi 5G Huawei ini tidak hanya berdampak kepada hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, namun juga terhadap negara-negara lain termasuk Filipina. Hal ini karena selain mengeluarkan larangan, Amerika Serikat juga

mengimbau negara-negara yang beraliansi dengannya untuk melakukan hal serupa terhadap Huawei. Imbauan Amerika Serikat kepada negara-negara tersebut mendapat respon beragam, ada yang sepenuhnya resmi menolak, ada pula yang memberlakukan penolakan parsial (Aljazeera, 2018).

Eksistensi Huawei di Filipina

Huawei telah melakukan bisnis cukup lama di Filipina. Perusahaan ini mulai melakukan ekspansi ke Filipina sejak tahun 2012 dan mulai melebarkan jangkauan bisnisnya di tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh Dr. Gavin selaku *chief executive officer* saat itu (ABC News, 2014). Pada tahun 2015, tercatat bahwa Huawei telah memiliki 40 *branded retail store* dan 32 *simple sales outlet* di Filipina dan memiliki target untuk meningkatkan jumlah *branded retail store* hingga 60 unit (Retail News, 2015). Bahkan, pada tahun 2019 Huawei telah membuka tokonya yang ke-150 di Filipina (Philstar, 2019). Penjualan Huawei merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang memimpin pasar ponsel di Filipina. Meskipun tidak menempati urutan pertama, Huawei membuat kemajuan yang cukup dapat diperhitungkan. Hubungan Filipina dan Huawei tidak baru terjalin pada saat pengambilan keputusan untuk mendukung teknologi 5G. Kerja sama juga dilakukan melalui *Department of Information and Communications Technology (DICT)*. Filipina dan Huawei Filipina menandatangani *Memorandum of Understanding* untuk program *Philippine Startup Challenge (PSC)*, dan *the Huawei Seeds for the Future Program* yang bertujuan untuk

mendukung wirausahawan muda bidang teknologi informasi. Huawei dan Filipina juga melakukan kerja sama dalam program Safe City. Proyek pertama Huawei Safe City di Filipina adalah Bonifacio Global City yang diinisiasi dengan Huawei sejak tahun 2014 (Los Angeles Times, 2019). Program *Safe City* ini fokus terhadap penggunaan CCTV dengan teknologi *face recognition* canggih terutama di kota Metro Manila dan Davao (CNN Philippines, 2019; Wall Street Journal, 2019).

Perebutan Pengaruh di Kawasan Asia Tenggara oleh Amerika Serikat dan Tiongkok

Struktur internasional memberikan pengaruh bagi negara untuk memberikan respon awal dari kebijakan luar negeri yang diambil (Rose, 1998, p.157). Struktur internasional pertama yang menjadi pemicu respon Filipina adalah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok khususnya di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Filipina sendiri memiliki hubungan militer yang cukup panjang dengan Amerika Serikat berdasarkan perjanjian *The 1951 U.S-Philippines Mutual Defense Treaty* (Council on Foreign Relations, 2016). Sedangkan, Filipina dan Tiongkok sejak Presiden Duterte menjabat menunjukkan hubungan yang cukup erat satu sama lain khususnya melalui penandatanganan investasi dalam program *Belt and Road Initiative* tahun 2018 (Xinhua Net, 2019). Tiongkok menganggap Filipina sebagai rekan penting dalam program ini (China Daily, 2018). Hal ini menunjukkan terdapat hubungan bilateral

Filipina baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Realisme neo klasik menganggap bahwa fakta- fakta yang terjadi pada tingkat struktur ini kemudian memberikan sebuah pengaruh tak langsung kebijakan luar negeri suatu negara (Rose, 1998, p.146). Khususnya mempengaruhi respon awal Filipina yang pada akhirnya mendukung teknologi 5G Huawei. Salah satu gagasan dalam teori realisme Neo Klasik melihat bahwa pertimbangan negara bisa saja berbeda dalam kemampuannya mengontrol agenda kebijakan, opsi kebijakan, atau mobilisasi sumber daya dalam memberikan respon terhadap insentif sistemik. (Lobell, et.al, 2009, p. 19). Hal ini dapat dikaitkan dengan perubahan sikap Filipina sejak Presiden Duterte menjabat di tahun 2016 terhadap hubungan Filipina dan Amerika Serikat. Filipina menyatakan "pemisahan" dengan Amerika Serikat. Hal ini diumumkan saat kunjungan Presiden Duterte ke Beijing, Tiongkok pada tahun 2016 (Reuters, 2016). Pernyataan tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan di pihak Amerika Serikat. U.S State Department yang meminta klarifikasi lebih lanjut terkait ucapannya mengingat Filipina merupakan mitra yang sudah menjalin hubungan sejak lama dengan Amerika Serikat. Meskipun terdapat fakta di atas, Filipina di sisi lain juga menyatakan bahwa ia membutuhkan Amerika Serikat dalam konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Namun, di saat bersamaan Filipina menyetujui untuk menerima investasi Tiongkok melalui program *Belt and Road Initiative* yang sempat dikritik oleh Amerika Serikat. Kerja sama ini juga dianggap mendukung kebijakan pemerintahan di bawah Presiden Duterte untuk

membangun infrastruktur yang disebut dengan *'Build, Build, Build'*. Ini juga mengacu pada tujuan pemerintah Filipina untuk mengantarkan negaranya ke pada *"golden age of infrastructure"* dengan berbagai program pembangunan yang masif. Data dari *Philippines Board of Investment* memperlihatkan bahwa Tiongkok memimpin peringkat sebagai investor asing dengan nilai investasi setara 930 juta dollar AS pada tahun 2018 (Xinhua Net, 2019). Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan rekan impor dan ekspor bagi Filipina. Kegiatan ekspor dan impor kedua negara cukup bersaing di Filipina, menempati urutan teratas khususnya pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 berdasarkan (Philippine Statistics Authority, 2017:Philippine Statistics Authority, 2018:Philippine Statistics Authority, 2019:Philippine Statistics Authority, 2020).

Isu penanganan kejahatan narkoba yang dilaksanakan Filipina melalui program *War on Drugs* juga menjadi tempat perebutan pengaruh antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kedua negara memberikan respon yang berbeda terhadap Filipina terkait kebijakan ini. Amerika Serikat memberikan kritik yang cukup disorot khususnya pada bidang penegakan hukumnya yang dianggap melanggar HAM. Amerika Serikat membicarakan kekhawatiran ini setelah adanya fakta bahwa terdapat 1.800 orang tewas dalam waktu 7 minggu sejak Presiden Duterte menjabat dan menerapkan kebijakan ini di Filipina (Reuters, 2016). Sementara itu, Tiongkok sebagai pesaing Amerika Serikat dalam konteks perang dagang mengambil sikap untuk memahami dan menghormati cara Filipina serta melakukan kerja

sama di bidang pemberantasan narkoba dan siap memberi dukungan untuk proses rehabilitasi, serta edukasi pencegahan. Selanjutnya, Tiongkok juga membiayai proyek untuk *anti-illegal drugs* dan kerja sama penegakan hukum keamanan (Philippines Department of Foreign Affairs, 2016).

Huawei sebagai Perusahaan Multinasional yang Ekspansif

Berdasarkan teori realisme neo klasik, respon atas struktur merupakan awal sebuah negara membuat parameter keputusan. Distribusi kekuasaan dari struktur struktur internasional dapat menggerakkan perilaku negara (Rose, 1998, p.158). Huawei sebagai struktur internasional berperan dalam distribusi penguasaan teknologi dan informasi Keberadaan Huawei sebagai struktur yang merupakan perusahaan multinasional ekspansif dan inovatif adalah awal dari keputusan Filipina Huawei Technologies Co., Ltd atau Huawei adalah perusahaan multinasional asal Tiongkok yang sudah berekspansi ke berbagai negara. Sebagai perusahaan multinasional, Huawei telah memasarkan produknya melalui cabang yang tersebar di 171 negara (Huawei, 2021).

Sebagai sebuah teori kebijakan luar negeri, realisme neo klasik melihat bahwa baik kekuatan struktural sistemik dan subsistemik sama-sama membentuk parameter luas dari perilaku negara di area internasional (Lobell.et.al, 2009, p.62). Kekuatan subsistemik yang menekan perilaku Filipina mendukung Huawei adalah kompetisi digital yang dihadapi khususnya pada wilayah kawasan Asia Tenggara. Filipina memiliki potensi di bidang

start up digital yang sedang berkembang pesat dengan menduduki peringkat 54 dari 100 secara global berdasarkan *The Startup Ecosystem Rankings* pada tahun 2019 (Business World, 2019). Walaupun demikian, untuk kawasan di Asia Tenggara Filipina sendiri masih berada di bawah Singapura yang berada di peringkat 21 secara global. Persaingan dan kompetisi di bidang ini merupakan peluang yang sedang diupayakan oleh Filipina. Keputusan menggunakan teknologi 5G dari Huawei Industri global memandang Huawei sebagai perusahaan teknologi yang inovatif. Huawei menempati posisi 10 besar sebagai salah satu 50 perusahaan terinovatif di dunia versi *Boston Consulting Group's 14th Annual Meeting* pada tahun 2020 (Forbes, 2020).

Posisi negara pada struktur internasional dan kemampuan kekuatan relatifnya yang menentukan arah dan visi kebijakan luar negeri negara tersebut sebelum kemudian diterjemahkan sesuai dengan keadaan domestik negara (Rose, 1998, p.146). Filipina seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan negara dengan kebutuhan internet tinggi namun, belum memiliki koneksi internet memadai. Huawei sebagai perusahaan teknologi inovatif dengan 5G yang dimiliki mendorong arah kebijakan Filipina untuk mendukung Huawei. 5G merupakan salah satu inovasi Huawei di bidang teknologi yang cukup berpengaruh saat ini. Huawei merupakan perusahaan yang diperhitungkan dalam pengadaan teknologi 5G di dunia. Huawei memegang 11.423 standar proposal dan menjadi yang terbesar dan memimpin dalam kompetisi 5G dibandingkan pesaingnya (Wall

Street Journal, 2019). Apabila dibandingkan dengan dari perusahaan lain, secara umum produk dari Huawei memiliki harga yang lebih murah yakni 10 persen lebih rendah dibanding pesaingnya. Ini menjadi salah satu nilai lebih yang membuat produk dari Huawei diminati (Washington Post, 2019).

Analisis Pertimbangan Kebijakan Filipina Terhadap Teknologi 5G Huawei

Setelah negara menyusun parameter kebijakan luar negeri berdasarkan keadaan di struktur internasional, keputusan kemudian akan disesuaikan dengan faktor pada *intervening variable* (faktor domestik) negara tersebut. Sub bab berikut akan memberikan gambaran pada tingkat domestik sebagai alasan Filipina mendukung teknologi 5G dari Huawei.

Pertimbangan Filipina tentang Dampak Hubungannya dengan Amerika Serikat

Realisme Neo Klasik memiliki pertimbangan bahwa negara mungkin berbeda dalam kemampuannya mengontrol agenda kebijakan, opsi kebijakan, atau mobilisasi sumber daya untuk merespon insentif sistemik sebagai hal unik yang belum dijelaskan oleh strukturalis (Lobell, et.al, 2009, p. 19). Amerika Serikat sebagai negara yang mengeluarkan larangan terhadap teknologi ini menyampaikan bahwa negara yang menerapkan 5G dari Huawei akan mendapat konsekuensi. Hal ini disampaikan oleh *secretary of state* Amerika Serikat, Mike Pompeo pada wawancara dengan *Fox Business Network* dikutip dari VOA News (2019). Mike Pompeo menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan

kembali hubungan bidang intelijen dengan negara yang menerapkan teknologi 5G Huawei di atas menegaskan bahwa keputusan negara yang mendukung teknologi dari Huawei ini berisiko kehilangan kerja sama dengan Amerika Serikat di bidang intelijen (Voa News, 2019). Sesuai dengan gagasan dari Realisme Neo Klasik mengenai negara yang dapat memberikan respon berbeda, Filipina pun mengabaikan peringatan Amerika Serikat dan mengambil keputusan untuk mendukung teknologi 5G dari Huawei. Filipina mengambil kemungkinan risiko dari konsekuensi ancaman tersebut karena mempertimbangkan peluang yang lebih genting. Selanjutnya, terlepas dari adanya risiko di atas, hubungan bilateral Filipina dengan Amerika Serikat tetap berjalan meski jaringan 5G dari Huawei telah tersedia. Kerja sama antara kedua negara tetap berjalan, bahkan di bulan November 2019 Filipina khususnya di bidang keamanan (US Defense Dept, 2019).

Internet sebagai Kebutuhan Nasional Filipina

Realisme Neo Klasik memandang kekuatan domestik sebagai *intervening variable* yang memiliki posisi di antara tekanan sistem dan produksi dari respon pada tingkat negara (Kitchen, 2008, p. 132). Keputusan Filipina dalam mendukung teknologi 5G Huawei merupakan *intervening variable* antara tekanan sistem dan produksi dari respon pada tingkat negara. Masyarakat Filipina sangat bergantung dengan internet untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa pengguna internet Filipina sebagai yang terberat di dunia dengan waktu rata-rata 10 jam per hari. Namun,

di sisi lain kecepatan internet Filipina kurang mendukung kebutuhan ini. Menurut Speedtest Global Index, kecepatan internet Filipina menempati urutan 109 dari 139 secara global (ABS-CBN News, 2019). Fakta lain yakni Laporan “*The State of Mobile Network Experience*” oleh OpenSignal juga mengungkapkan hal serupa terkait kecepatan internet Filipina yang menduduki peringkat 20 besar negara dengan kecepatan download di bawah 10 Mbps (The Philippine Star, 2019). Internet di Filipina juga sempat dinobatkan sebagai yang paling lambat se-Asia Pasifik berdasarkan Laporan “*State of the Internet*” oleh Akamai pada kuartal terakhir tahun 2016 (CNN Philippines, 2016). Filipina juga memiliki jumlah pengguna internet yang cukup besar dan bertumbuh secara dinamis dari tahun ke tahun. Jumlah pengguna mencapai 40.3% dari total populasi pada tahun 2019 dan sempat mencapai angka 60 % dari total populasi pada tahun 2018. Pertumbuhan pada tahun 2018 tersebut Filipina menempati urutan ke 12 di antara 20 negara lainnya dengan jumlah pengguna internet terbanyak (Philstar Global, 2018).

Internet sebagai Pendukung Program Infrastruktur era Duterte

Peran teknologi 5G dari Huawei dalam menunjang program infrastruktur Presiden Duterte adalah dengan sebagai pendukung koneksi internet yang lebih baik khususnya dalam pertukaran data. Koneksi internet yang lebih baik diharapkan mampu menghubungkan antar infrastruktur yang dibangun, sebab teknologi 5G dari Huawei sebelumnya telah

dimanfaatkan sebagai penunjang dalam mewujudkan Smart Cities, khususnya untuk mendukung koneksi CCTV, pemantau lalu lintas, sensor tingkat air, lampu lalu lintas, parkir, bahkan tempat sampah dapat diubah menjadi perangkat pintar dan bisa dihubungkan dengan IoT. IoT atau *internet of things* adalah sebuah koneksi fisik yang menghubungkan antar perangkat untuk pertukaran data. Perangkat-perangkat pintar ini di sebuah kota dapat mengumpulkan data dan mengirimkan informasi ke pusat dan 5G membuat data terkirim secara *real-time* disertai dengan gambar dalam kualitas tinggi (Philippines News Agency, 2019). Di Filipina sendiri, Huawei telah memiliki program Smart Cities di kota Makati. Makati melakukan kerja sama dengan Huawei melalui penyediaan *urban intelligence solutions* untuk mengembangkan kemampuan respons melalui interkoneksi infrastruktur digital. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan kejahatan dan melakukan permintaan pendampingan kepada *city command centers* (PR News Wire, 2019).

Manfaat Internet Cepat sebagai Pendorong Ekonomi Digital Filipina

Teknologi informasi memiliki peran dalam mentransformasikan tenaga kerja, pendidikan, manajemen dan hiburan dengan menciptakan peluang pasar baru yang memberikan dampak ekonomis (Tsyganov & Apalkova, 2016, p.296). Hal ini ternyata dialami oleh Filipina. Penggunaan Internet di Filipina juga dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi melalui e-commerce. Menurut data di bulan Januari 2018, tercatat sejumlah 67 juta

pengguna online. Ini merupakan peningkatan sebanyak 12% dibandingkan tahun sebelumnya (CNN Philippines, 2019). Total pendapatan dari sektor e-commerce di tahun 2018 adalah sejumlah \$840 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang menghasilkan \$688 juta, ini merupakan peningkatan sebesar 36 triliun peso (CNN Philippines, 2019). Namun, di sisi lain penerimaan investasi *start-up* di Filipina masih kalah dengan negara tetangga Indonesia (South China Morning Post, 2019). Jumlah yang diterima Filipina hanya sepersepuluh dari penerimaan Indonesia di bidang serupa. Potensi yang terdapat pada aktivitas ekonomi digital tentu saja tidak dapat dilewatkan begitu saja apabila ketersediaan jaringan internet di Filipina tidak mendukung dengan baik.

Manfaat Internet Cepat sebagai Komponen Pendukung Cybersecurity Filipina

Pembangunan infrastruktur siber (cyber infrastructure) merupakan hal yang signifikan bagi Filipina. Ini terdapat di salah satu poin tujuan dalam National Security Strategy 2017-2022 Filipina yang berbunyi : *“provide strong cyber infrastructure and cyber security”* (National Security Council, 2018). Teknologi 5G merupakan komponen penting dalam infrastruktur siber yang menyediakan kecepatan internet lebih baik dari generasi sebelumnya. Pemeliharaan cybersecurity berdasarkan Robinson et al. (2012) dalam Tsakanyan (2017) dapat dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor seperti *National-level policy units, National-level coordinating units or institutions, Specific inter-governmental units, Operational agencies* —

intelligence, armed forces and law enforcement authorities, National and/or governmental computer emergency response teams (CERTs), Communication service providers responsible in varying ways for parts of the infrastructure which make up 'cyberspace', Infrastructure hardware providers, serta Software and services providers which design, develop, produce and market software. Huawei sebagai penyedia peralatan teknologi 5G bertindak sebagai *Infrastructure hardware providers*, yakni salah satu aktor yang terlibat dalam pemeliharaan *cybersecurity*. Peran *infrastructure hardware providers* seperti perusahaan Huawei dapat mendukung aspek infrastruktur siber terutama dalam performa jaringan. Kecepatan jaringan adalah aspek penting dalam mendukung *cyberinfrastructure* suatu negara (Stewart et. all, 2020).

KESIMPULAN

Filipina melakukan pertimbangan kebijakan luar negeri berdasarkan dua tingkat analisis yakni pada tingkat struktur internasional dan faktor domestik. Hal ini dapat dilihat dari Huawei sebagai perusahaan multinasional ekspansif serta persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok yang berperan di tingkat struktur dan mempengaruhi keputusan Filipina di tahap awal dalam membentuk parameter keputusan dan mendorong Filipina untuk mengambil sikap atau respon pada tingkat struktur internasional. Analisis berikutnya ada pada tingkat domestik yakni analisis Filipina dalam memandang teknologi asing. Pada tingkat ini, penulis melihat bahwa Filipina memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi digitalnya

serta membangun infrastruktur untuk *cybersecurity*.

Keputusan ini diambil saat Filipina berada di bawah tekanan Amerika Serikat. Tekanan tersebut tidak menghalangi keputusan Filipina untuk menggunakan teknologi dari Huawei karena terdapat kebutuhan secara domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. (2018, December 18). *Why are countries banning Huawei?*. Retrieved 2020, from <https://www.aljazeera.com/amp/news/2018/12/countries-banning-huawei-181206130850129.html>
- Altares, JM. (2018, Aug 20). *Philippines has important role in BRI*. Retrieved 2020, from <https://www.chinadaily.com.cn/a/201808/20/WS5b7a2509a310add14f386a9f.html>
- Bae, Y.J. (2003). Information technology and the empowerment of new actors in international relations. *Journal of International and Area Studies*, 10 (2), 79-92.
- Bengali,S & Pierson,D. (2019, June 10). *Why a ban on huawei is being ignored by some of the oldest U.S. allies in asia*. Retrieved 2020, from <https://www.latimes.com/world/la-fg-philippines-huawei-southeast-asia-20190610-story.html>
- Bernadette, A.O., & Qian, W. (1999). Technology Transfer: A Mode of Collaboration Between the European Union and China. *Europe-Asia Studies*, 51(1), 123-142.doi: 10.1080/09668139999155
- Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*. 9 (2), 27-40. doi:10.3316/JR0902027.
- Bo,X. (2019, Jan 11).*China tops list of philippines' foreign investors in 2018*. Retrieved 2020, from

- http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/11/c_137736703.htm
- Cha, B. (2015, Mar 13). *What Is 5G, and What Does It Mean for Consumers?*. Retrieved 2021, from <https://www.vox.com/2015/3/13/11560156/what-is-5g-and-what-does-it-mean-for-consumers>
- Choucri, N. (2012). *Cyberpolitics in international relations*. Cambridge: The MIT Press.
- Columbus, L. (2020, Jun 28). *The most innovative companies of 2020 according to bcg*. Retrieved 2020 from <https://www.forbes.com/sites/louiscolombus/2020/06/28/the-most-innovative-companies-of-2020-according-to-bcg/?sh=751162502af3>
- Crismundo, K. (2019, Jun 30). *Huawei focuses on digital transformation in ph*. Retrieved 2020, from <https://www.pna.gov.ph/articles/1073675>
- Department of Foreign Affairs. (2016, Oct 21). *Joint statement of the republic of the philippines and the people's republic of china*. <https://dfa.gov.ph/newsroom/dfa-releases/10748-joint-statement-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-people-s-republic-of-china>
- Department of Trade and Industry. (2016, Jan). *Philippine E-commerce Roadmap*. Retrieved 2020, from <https://psa.gov.ph/statistics/foreign-trade/fts-release-id/69937https://ecommerce.dti.gov.ph/wp-content/uploads/2020/07/FINAL-Philippine-E-Commerce-Roadmap-2016-2020-01-29-2016.pdf>
- Dizon, G. (2019, June 1). *Huawei remains strong in philippines with opening of 150th store*. Retrieved 2020, from <https://www.philstar.com/lifestyle/on-the-radar/2019/07/01/1929410/huawei-remains-strong-philippines-opening-150th-store>
- Doffman, Z. (2019, May 15). *Trump signs executive order that will lead to U.S. ban on huawei*. Retrieved 2020, from <https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/15/trump-expected-to-sign-executive-order-leading-to-ban-on-huawei-this-week/amp/>
- Epps, G.V. (2013). U.S and NATO engagement with russia in cyber domain. *The Quarterly Journal*, 12 (4), 15-50.
- Flores, H. (2017, May 12). *China urges un to support philippines' war on drugs*. Retrieved 2020, from <https://www.philstar.com/headlines/2017/05/12/1699401/china-urges-un-support-philippines-war-drugs>
- Fung, B. (2019, April 11). *How china's huawei took the lead over u.s.. companies in 5g technology*. Retrieved 2020, from <https://www.washingtonpost.com/technology/2019/04/10/us-spat-with-huawei-explained/>
- Go, M.V. (2014 Mar 14). *Huawei to expand presence in ph*. Retrieved 2020, from <https://news.abs-cbn.com/business/03/14/14/huawei-expand-presence-ph>
- Harrison, L. (2001). *Political research an introduction*. London: Routledge
- Herbut, M & Milcarz, R.K. (2017). The explanatory power of structural realism in the 21st century: the eastern partnership, russian expansionism and the war in ukraine. *Polish Political Science Yearbook*. 46 (2), 190-204.
- Heydarian, R. (2019, July 18). *Ignoring the us, philippines goes with huawei*. Retrieved 2020, from <https://asiatimes.com/2019/07/ignoring-the-us-philippines-goes-with-huawei/>
- Ho, S.P.S. (1997). Technology transfer to china during the 1980—how effective? some evidence from jiangsu. *Pacific Affairs*, 70 (1) 85-106.
- Huawei. (2020). *About Huawei (n.d)*. Retrieved 2020, from <https://www.huawei.com/en/corporate-information>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Pengantar studi hubungan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kitchen, N. (2010). Systemic pressure and domestic ideas : a neoclassical realist model of grand strategy formation. *Review of International Studies*, 36 (1), 117-143 DOI: 10.1017/S0260210509990532
- Leigh, K., Martin, P., & Leung, A. (2020, Dec 17). *Troubled waters: where the u.s. and china could clash in the south china sea*. Retrieved 2020, from <https://www.bloomberg.com/graphics/2020-south-china-sea-miscalculation/>
- Lewis-Beck, M.S., Bryman, A., & Futing Tao, T. (2004). *The SAGE encyclopedia of social science research method*. California: SAGE Publications, Inc.
- Lobell, S., Ripsman, N., & Taliaferro, J. (Eds). (2009). *Neoclassical realism, the state, and foreign policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Looper, C. (2020, May 22). *What is 5g? the next-generation network explained*. Retrieved 2020 from, <https://www.digitaltrends.com/mobile/what-is-5g/>
- Lopez, E. (2019, Sep 16). *No country for unicorns: why philippine start-ups are struggling*. Retrieved 2020 from, <https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3027171/no-country-unicorns-why-philippine-start-ups-are-struggling>
- Mandhana, N. (2019, February 2020). *Huawei's video surveillance business hits snag in philippines*. Retrieved 2020, from <https://www.wsj.com/articles/huaweis-video-surveillance-business-hits-snap-in-philippines-11550683135>
- Mendes, M.V.I. (2020). The limitations of international relations regarding MNCs and the digital economy: evidence from brazil. *Review of Political Economy*. 33 (1), 67-87, doi: 10.1080/09538259.2020.1730609
- Merriam, S.B. (2009). *Qualitative research: a guide to design and implementation*. San Fransisco : Jossey Bass
- Miles, M., Huberman, M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative data analysis: a methods source book*. California: SAGE Publications
- National Security Council. (2018). *The national security policy*. Retrieved 2018, from <https://nsc.gov.ph/index.php/national-security-policy-2011-2016>
- Neuman, W.L. (2014). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*. England: Pearson Education Limited.
- Ning, X. (2019, Maret 18). *Us wages wide-ranging campaign to block huawei*. Retrieved 2020, from <https://www.voanews.com/usa/us-wages-wide-ranging-campaign-block-huawei>
- Parameswaran, P. (2017, Februari 17). *Oldest US Ally in Asia: Thailand or the Philippines?*. Retrieved 2020, from <https://thediplomat.com/2017/02/which-country-is-the-oldest-us-ally-in-asia/>
- Philippines Government. (2020). *About The Government*. (2020).. Retrieved 2020, from <https://www.gov.ph/philippine-government>
- Philippine Statistics Authority. (2017, Jan 10). *External trade performance: november 2016*. Retrieved 2020, from <https://psa.gov.ph/statistics/foreign-trade/fts-release-id/69937>
- Philippine Statistics Authority. (2020, Feb 11). *Highlights of the philippine export and import statistics: december 2019*. Retrieved 2020, from <https://psa.gov.ph/statistics/foreign-trade/fts-release-id/160003>
- Philippine Statistics Authority. (2019, Feb 12). *Highlights of the philippine export and import statistics: december 2018*. Retrieved 2020, from <https://psa.gov.ph/statistics/foreign-trade/fts-release-id/137717>
- Philippine Statistics Authority. (2018, Feb 9). *Highlights of the philippine export and import statistics: december 2017*. Retrieved 2020, from <https://psa.gov.ph/statistics/foreign-trade/fts-release-id/129598>

- Rizal, M & Yani, Y.M. (2016). Cybersecurity policy and its implementation in Indonesia. *Journal of ASEAN Studies*, 4 (1), 61-78.
- Rola, A. (2019, April 30). *Pnp probes alleged 'spying' activities of huawei*. Retrieved 2020, from <https://cnnphilippines.com/news/2019/4/30/Huawei-China-security-PNP-investigation-.html>
- Rose, G. (1998). Neoclassical realism and theories of foreign policy. *World Politic*, 51. (1), 144-172.
- Rosenau, J.N, & Singh, J.P. (2002). *Information technologies and global politics : the changing scope of power and governance*. New York: State University of New York Press
- Steward, E. (2019, August 19). *The us government's battle with chinese telecom giant huawei, explained*. Retrieved 2020, from <https://www.vox.com/technology/2018/12/11/18134440/huawei-executive-order-entity-list-china-trump>
- Stewart, C., Simms, S., Plale, B., Link, M., Hancock, D., & Fox, G. (2010). What is cyberinfrastructure?. *Proceedings ACM SIGUCCS User Services Conference*. 37-44, doi: 10.1145/1878335.1878347.
- Strumpf, D. (2019, Feb 26). *Where china dominates in 5g technology*. Retrieved 2020, from <https://www.wsj.com/articles/where-china-dominates-in-5g-technology-11551236701>
- The Retail News. (2015, December 3). *Welcomes Chinese Smartphone Huawei Expansion*. Retrieved 2020, from <https://www.retailnews.asia/philippines-welcomes-chinese-smartphone-huawei-expansion/>
- Tsakanyan, V.T. (2017). The role of cybersecurity in world politics. *International Relations*, 17 (2), 339-348 doi: 10.22363/2313-0660-2017-17-2-339-348
- Tsyganov, S. & Apalkova, V. (2016). Digital Economy: A new paradigm of global information society. *Economic Review*. 45 (3), 295-311.
- Ufen, A. (2008). Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: lesson for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand. *The Pasific Review*. 21(3), 327-350. doi:10.1080/09512740802134174
- US Defense Dept. (2019, Nov 19). *Philippines, U.S. Joint Defense Statement*. Retrieved 2020, from <https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2020089/philippines-us-joint-defense-statement/>
- Reuters U.S. (2016, Aug 22). *Voices concern over extra-judicial killings in philippines*. Retrieved 2020, from <https://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-usa-idUSKCN10X1MU>
- World Bank. (2020, October 16). *The world bank in the Philippines*. Retrieved 2020, from <https://www.worldbank.org/en/country/philippines/overview#1>
- Xinhue Net. (2019, May 16). *Philippines gains investments, more trade after joining bri: trade secretary*. Retrieved 2020, from http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/16/c_138064175.htm
- Xinhua Net.(2019, June 20). *Philippines' globe telecom launches fixed wireless 5g network*. Retrieved 2020, from http://www.xinhuanet.com/english/201906/20/c_138159604.htm
- Yap, WC. (2019, December 25). *State support helped fuel huawei's global rise*. Retrieved 2020, from <https://www.wsj.com/articles/state-support-helped-fuel-huaweis-global-rise-11577280736>
- Zialcita, S. (2019, Jan 4). *Ph e-commerce industry sees more growth in 2019*. Retrieved 2020, from <https://cnnphilippines.com:443/business/2019/01/04/philippine-e-commerce-2019.html>